

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Theodorus Alexandro Polu

NPP. 30.1152

Asdaf Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Keuangan Publik

Email: poluendo@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dadang Suwanda, SE., M.Ak., MM., CA

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of the Indonesian government system shifting to fiscal decentralization related to the authority that has been given by the central government to the local government, namely regional autonomy. The authority to organize, control, regulate, and plan given by the central government in order to manage its own affairs based on the capabilities and characteristics of each region and refer to applicable and binding laws and regulations. Purpose:* *The purpose of this study was to determine the regional financial capacity of Ngada Regency in supporting the implementation of regional autonomy, to determine the supporting and inhibiting factors of the regional financial capacity of Ngada Regency in supporting the implementation of regional autonomy, and to determine the efforts of the local government of Ngada Regency to improve regional financial capacity in supporting the implementation of regional autonomy. Method:* *The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Result:* *Ngada Regency for 5 budget years, namely 2016-2020, shows that there is still a high level of dependence on regional income from the central and provincial governments. Efforts that can be made by the local government in order to increase regional financial capacity, namely by, among others: Exploring regional potentials that can be utilized as new sources of PAD to become objects and subjects of regional taxes and levies. Then develop new things in increasing PAD through the application of online-based information technology as a supporting tool for data collection, determination and collection of existing PAD. Conclusion:* *The existing regional financial capacity is measured based on the results of ratio analysis, which shows that Ngada Regency is still relatively low in supporting the implementation of regional autonomy. The collection of regional taxes and levies has not been optimal or is still very low, this can be seen from the low PAD target and realization. Furthermore, regional potential has not been utilized properly, as indicated by the large number of regional economic activities that have not been optimally taxed and levied. As well as the high level of dependence of the Ngada Regency region on existing transfer funds, this is indicated by the low level of PAD ability when compared to general transfer funds which are still very high.*

Keywords: *Analysis Capacity, Regional Finance, Regional Autonomy, PAD*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang sistem pemerintah Indonesia yang bergeser menjadi desentralisasi fiskal terkait dengan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pihak pemerintah Daerah yaitu otonomi daerah. Kewenangan penyelenggaraan, pengendalian, pengaturan, dan perencanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat agar bisa mengatur urusannya sendiri berdasarkan kemampuan dan karakteristik daerahnya masing-masing serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Ngada untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kabupaten Ngada selama 5 tahun anggaran yakni tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Ngada terhadap pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yakni dengan cara antara lain: Menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD baru untuk dijadikan objek maupun subjek dari pajak dan retribusi daerah. Kemudian pengembangan hal baru dalam meningkatkan PAD melalui penerapan teknologi informasi berbasis online sebagai sarana pendukung bagi pendataan, penetapan dan pemungutan PAD yang ada. **Kesimpulan:** Kemampuan keuangan daerah yang ada diukur berdasarkan hasil analisis rasio yang menunjukkan Kabupaten Ngada tergolong masih rendah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum optimal atau masih sangat rendah, hal ini dapat kita lihat dari target dan realisasi PAD yang masih rendah. Kemudian potensi daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik, hal ini ditandai dengan banyaknya aktivitas perekonomian daerah yang belum optimal dikenakan pajak dan retribusi. Serta tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Ngada terhadap dana transfer yang ada, hal ini ditandai dengan tingkat kemampuan PAD yang rendah jika dibandingkan dengan dana transfer umum yang masih sangat tinggi.

Kata kunci: Analisis Kemampuan, Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, PAD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah merupakan pemberian kemandirian bagi setiap daerah otonomi agar mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal bagi masyarakat dan sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure) atau Prosedur Operasi Standar yang ada serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pengembangan, pembangunan dan pemanfaatan secara optimal seluruh perolehan dari potensi daerah yang ada serta hal ini pun dapat meningkatkan akuntabilitas perekonomian daerah tersebut agar bisa membantu memenuhi kebutuhan dari penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan yang ada. Sebagai pihak pelaksana otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memiliki kemandirian di dalam membiayai seluruh tugas yang akan dilakukan dan juga pembangunan dan pengembangan di daerahnya sehingga pihak pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang ada. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

seringkali didapatkan melalui sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keuangan daerah ialah semua hal yang wajib dan hak daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang di dalamnya termuat seluruh bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hal yang wajib dan hak daerah dan juga yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan daerah merupakan semua jenis pemasukan yang mendominasi untuk menopang otonomi daerah agar mampu menjalankan roda pemerintahan daerah. Hampir atau bahkan bisa dikatakan bahwa seluruh kegiatan pemerintah daerah membutuhkan biaya untuk menjalankannya. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah merupakan satu variabel yang utama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan pengukuran kemampuan atas keuangan suatu daerah dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan yang terdiri dari beberapa bagian. Pengukuran Kemampuan keuangan dilakukan.

Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur yang lebih tepatnya berada di pulau Flores. Kabupaten Ngada ini dikenal juga dengan istilah "Kota Kabut", karena wilayah atau daerahnya yang berada di pegunungan yang hampir setiap harinya diguyuri hujan dan diselimuti kabut tebal. Kabupaten Ngada merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki potensi-potensi daerah yang menjadi pemasok atau sumber Pendapatan Asli Daerahnya dengan melihat dari berbagai aspek wilayah yang strategis dan hal ini pun sangat menguntungkan dari segi pariwisata dan ekonomi. Namun dengan adanya potensi tersebut, kabupaten Ngada ternyata belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah baik pada sector pajak daerah, retribusi daerah ataupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Derajat Ketergantungan, dan Rasio Kemandirian Keuangan serta Rasio Efektifitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut tentu sangat membantu untuk melihat kemampuan daerah demi mewujudkan keberhasilan atas otonomi daerah. Seiring berjalannya otonomi daerah, dilihat ada banyak daerah-daerah di Indonesia yang cenderung melaksanakan pemekaran wilayah. Hal ini dijadikan peluang oleh pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru sepanjang memenuhi prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah akan berhasil dilaksanakan apabila pemerintah daerah mendukung melalui pendanaan yang memadai. Pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan atas potensi daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kebijakan desentralisasi fiskal menjadi dasar dalam pembiayaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan serta tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan, mendapatkan transfer dari pemerintah pusat, dan menentukan belanja daerah sehingga daerah diberikan kesempatan untuk mengatur pengelolaan anggaran tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas ekonomi daerah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah akan menapatkan dampak positif

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan kabupaten Ngada yang ternyata belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan daerah baik pada sector pajak daerah, retribusi daerah ataupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan yang sah. anggaran 2016 sampai pada tahun anggaran 2019 terjadi peningkatan secara bertahap dan terus menerus pada total pendapatan daerah Kabupaten Ngada, namun kontribusi pendapatan transfer sangat besar apabila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah ataupun pendapatandaerah lainnya. Menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Ngada

terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Dilihat bahwa kontribusi dana transfer masih sangat besar dari anggaran dalam 5 (lima) tahun anggaran APBD Kabupaten Ngada. Jika dipersentasikan, maka besar kontribusi pendapatan transfer berada pada angka 70% ke atas. Kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah hanya dibawah 10% sajadari total pendapatan daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih rendahnya kemandirian daerah Kabupaten Ngada selama 5 (lima) tahun anggaran tersebut. rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah melalui sumber pendapatan yang ada. Pada dasarnya setiap sumber PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun ada yang mengalami ketidakstabilan, sehinggaperlu adanya usaha guna meningkatkan sumber pendapatan yang ada.

Pada penyelenggaraan otonomi daerah, permasalahan seperti kontribusi PAD yang rendah akan mempengaruhi tingkat kemampuan keuangan daerah. Jika tidak ditindaklanjuti maka suatu hari pemerintah daerah Kabupaten Ngada akan dianggap gagal dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Sehingga diperlukan usaha dalam meningkatkan PAD dengan tujuan akhir meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ngada. Selain itu, sangat perlu dilakukan suatu analisis terhadap kemampuan keuangan untuk melihat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam bidang analisis kemampuan keuangan daerah. Penelitian oleh Anjar Nora Vurry, I Wayan Suwendra, dan Fridayana Yudiatmadja (2018) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dari Tren Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan hasil Rasi Kemandirian Keuangan Kabupaten Buleleng Masuk Kategori Rendah Sekali Dengan Rata-Rata Kemampuan Keuangan Daerah Dikategorikan Rendah Dengan Pola Instrukturif. Namun Trend Yang Dihasilkan Cendrung Naik. Penelitian oleh Jovan Febriantoko (2017) yang berjudul Analisis Kemampuan Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera, mendapatkan hasil bahwa berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian di pulau Sumatera disimpulkan bahwa total pendapatan asli daerah di seluruh pulau sumatera sebesar 18,025 triliun. Penelitian oleh Deddy Candra, Vince Ratnawati, dan Yesi Mutia dengan judul Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Mendapatkan hasil bahwa Provinsi Riau terus mengalami tren positif pertumbuhan tingkat kemandirian meskipun tingkat pertumbuhannya masih dengan pola hubungan instrukturif.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dapat dilihat dari lokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan.. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Jovan Febriantoko tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Kemampuan Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2019:140-141). Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan Manajemen Pemerintahan yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, untuk mengetahui factor pendukung dan penghambat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada dalam mendukung pelaksanaan otonomi

daerah. untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Ngada untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai Kemampuan Keuangan Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 7 orang yang diambil dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Kemampuan Keuangan Daerah menurut Mahmudi (2019:140-141) yang dijelaskan bahwa Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, dan rasio efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Ngada dapat dilihat dari APBD tahun 2016-2020. terjadi peningkatan pada pendapatan daerah Kabupaten Ngada dari tahun anggaran 2016 hingga tahun 2020. Namun pada realisasinya, total pendapatan daerah KabupatenWajo belum mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian lebih didominasi oleh pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Kontribusi pendapatan transfer mencapai angka 70% ke atas sedangkan kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah Kabupaten Ngada hanya di bawah angka 10%. Hal tersebut menjadi permasalahan dimana tingkat kemandirian daerah Kabupaten Ngada masih dikategorikan rendah dalam 5 (lima) tahun anggaran tersebut.

Penetapan target penerimaan APBD ini harus disesuaikan dengan keadaan daerah Kabupaten Ngada, yaitu sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah yang dimiliki agar bisa memenuhi target pendapatan daerah. Penetapan target tersebut dapat difokuskan pada penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyesuaian tersebut lebih ditekankan pada penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikarenakan PAD merupakan komponen pendapatan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu penetapan target pendapatan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah dan tentunya disesuaikan dengan keadaan sumber PAD yang dimiliki oleh Kabupaten Ngada pada tahun anggaran yang bersangkutan.

3.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada tentunya menjadi salah satu bagian penting dalam mengukur kemampuan keuangan Kabupaten Ngada. Hal tersebut berkaitan dengan pengelolaan potensi daerah dan berbagai sumber penerimaan daerah yang secara langsung dilakukan oleh

pemerintah daerah Kabupaten Ngada guna memenuhi segala kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya. Perkembangan PAD Kabupaten Ngada bisa dilihat pada realisasi PAD yang belum maksimal dimana kontribusi PAD Kabupaten Ngada berada dibawah angka 10% terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Ngada. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka permasalahan kontribusi PAD yang rendah maka tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Ngada akan menjadi rendah dan begitu pula sebaliknya. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada sendiri tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi sumber penerimaan PAD itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada terdiri dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lain yang sah.

3.3. Pendapatan Transfer

Kabupaten Ngada tidak hanya memiliki sumber pendapatan internal, namun ada pula sumber pendapatan lain yakni pendapatan transfer yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat maupun provinsi bagi Kabupaten Ngada. Seperti halnya pada tabel 1.1 sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan transfer Kabupaten Ngada mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebanyak Rp 1.078.839.765 menjadi Rp 1.078.839.765 pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 menjadi Rp 1.096.482.850, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019-2020 masing-masing Rp 1.146.228.487 dan Rp 1.149.306.729. Kemudian kontribusi pendapatan transfer mencapai angka rata-rata diatas 70%, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Ngada memiliki ketergantungan yang tinggi atas pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat serta provinsi. Penyumbang terbesar dalam pendapatan transfer Kabupaten Ngada adalah pada pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat provinsi atau dikatakan sebagai dana perimbangan. Dana tersebut merupakan sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah guna memfasilitasi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ada 2 (dua) tujuan utama atas dana perimbangan, yaitu yang pertama guna menurunkan kesenjangan fiskal antar pemerintah dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah lainnya. Kedua, menciptakan keseimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar pemerintah daerah lainnya.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kemampuan keuangan Kabupaten Ngada tentunya dapat dilihat melalui hasil pendapatan asli daerah yang ada, salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Ngada sangat ditentukan oleh sistem manajemen yang berfungsi dalam mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini berhubungan dengan sumber daya manusia yang belum memadai dalam mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rendahnya kepedulian masyarakat tentang pentingnya pembayaran pajak. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada dalam menghadapi permasalahan tersebut tentunya dapat merencanakan sejumlah program maupun kegiatan yang ditujukan agar pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih optimal sehingga menambah hasil dari Pendapatan Asli Daerah sesuai target yang diharapkan. Hal-hal yang dapat dilakukan seperti manajemen sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah guna menghindari timbulnya kesulitan masyarakat dalam proses pembayaran pajaknya masing-masing. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada juga dapat mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan terkait pentingnya membayar pajak agar timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk mau membayar pajak. Selain itu, pemanfaatan aplikasi berbasis online juga akan turut

memudahkan pelayanan pembayaran pajak bagi masyarakat serta pendataan ulang juga dapat dilakukan secara online agar pemerintah sendiri memiliki database para wajib pajak dan pendataan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah retribusi atas usahanya sehingga akan lebih terorganisir dan optimal dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi.

Pemerintah daerah Kabupaten Ngada perlu mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi daerah yang ada di Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada memiliki kondisi geografis yang didominasi oleh kawasan pertanian dan perkebunan sehingga apabila dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka hal tersebut dapat menjadi salah satu sumber penerimaan bagi PAD Kabupaten Ngada. Pemerintah Kabupaten Ngada dapat lebih memperhatikan keadaan para pekerja seperti buruh tani dan perkebunan yang ada, memberikan sejumlah bantuan fasilitas yang akan menunjang hasil panen yang lebih baik. Sehingga dapat menjadi salah satu keunggulan bagi Kabupaten Ngada apabila hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke daerah-daerah lainnya. Tentunya akan memberikan peningkatan bagi PAD Kabupaten Ngada, secara otomatis kemampuan keuangan daerah akan menjadi lebih baik.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa Kelemahan pemerintah daerah Kabupaten Ngada selama ini terletak pada kemampuan daerah bersama pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngada secara optimal. Kelemahan tersebut termasuk kelemahan dalam mencari sumber penerimaan PAD, kelemahan dalam memanfaatkan segala sumber penerimaan PAD yang telah ada. Belum maksimalnya pemungutan dan pengelolaan atas setiap sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada seperti belum optimalnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Ngada dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat yang berkewajiban membayar pajak terhadap pentingnya pembayaran pajak maupun kewajibannya untuk membayar retribusi

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di kabupaten Ngada mengenai Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah kabupaten Ngada dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang belum optimal atau masih sangat rendah, hal ini dapat kita lihat dari target dan realisasi PAD yang masih rendah. Kemudian potensi daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik, hal ini ditandai dengan banyaknya aktivitas perekonomian daerah yang belum optimal dikenakan pajak dan retribusi. Serta tingginya tingkat ketergantungan daerah Kabupaten Ngada terhadap dana transfer yang ada, hal ini ditandai dengan tingkat kemampuan PAD yang rendah jika dibandingkan dengan dana transfer umum yang masih sangat tinggi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yakni dengan cara antara lain: Menggali potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber PAD baru untuk dijadikan objek maupun subjek dari pajak dan retribusi daerah. Kemudian pengembangan hal baru dalam meningkatkan PAD melalui penerapan teknologi informasi berbasis online sebagai sarana pendukung bagi pendataan, penetapan dan pemungutan PAD yang ada.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Ngada sehingga informasi serta data yang dikumpulkan oleh penulis masih terbilang sangat sedikit dan belum mampu melengkapi seluruh aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara

mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Ngada, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyukseskan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi, 2019. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penulisan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Febriantoko, Jovan. 2017. *Analisis Kemampuan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera. Seminar Nasional Teknologi Informasi Bisnis dan Desain*.
- Vurry, A. N., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Trend pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(2), 128-135.
- Candra, D., Ratnawati, V., & Mutia, Y. (2018). *Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau*. Jurnal Ekonomi, 27(2), 146-159.